

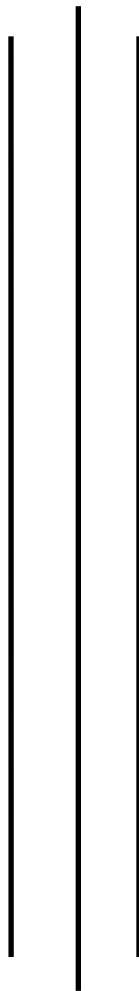
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja ini mengacu Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025. Dalam dokumen ini dijabarkan berbagai rencana program/ kegiatan yang telah disesuaikan guna mengakomodir tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.

Sragen, 03 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19791225 199810 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRI WULAN II	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Tri Wulan II	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Evaluasi Renja Tahun 2025 s/d Tri Wulan II	7
Tabel III.1	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	19



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website <http://dpmpstsp.sragenkab.go.id/>, E-mail dpmpstsp@sragenkab.go.id

S R A G E N - 5 7 2 1 3

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050/ /18/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten;
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025;
11. Keputusan Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 050/2149/18/2021 tentang Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN,

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 19810 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan. Perubahan renja dapat dilaksanakan setelah penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bahwa dengan ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka Perangkat Daerah menyusun perubahan rencana kerja. Perubahan Renja 2025 ini memuat program/ kegiatan/ subkegiatan sebagai pedoman untuk memberikan arah pedoman terhadap semua program/ kegiatan/ subkegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen tahun 2025. Perubahan Renja ini disusun berdasarkan kondisi pelayanan saat ini serta adanya perubahan asumsi tahun berjalan, sehingga nantinya rencana kerja yang disusun dapat tercapai dengan kondisi yang diharapkan. Perubahan Renja ini mengacu pada kondisi eksisting serta evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Tri Wulan II.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi perubahan renja disesuaikan dengan renstra.
2. Program/ kegiatan/ subkegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.

3. Program/ kegiatan/subkegiatan yang direncanakan memuat target capaian indikator, kinerja *outcome* program, target dan indikator kinerja kegiatan/subkegiatan, dana yang diperlukan kegiatan.
4. Perubahan renja ini merupakan dokumen yang akan dilaksanakan dalam tahun berkenaan.

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan perubahan renja tahun 2025 didasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang dimutakhirkan terakhir melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9);
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 - m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 12);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
- p. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 19).
- q. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 21);
- r. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 13);

1.3.Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 disusun dengan dimaksudkan:

1. mengakomodasi perubahan kondisi pada tahun 2025 yang berkaitan dengan program/kegiatan/subkegiatan;
2. sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2025 yang mencakup rencana capaian kinerja (target), untuk seluruh indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja tahun 2025 sebagai berikut;

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025;

2. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan rencana kerja tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan,
- 1.4 Sistematika Penulisan,

BAB II HASIL HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Triwulan II
Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan
Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP,

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 s/d Triwulan II

DPMPTSP Kabupaten Sragen, sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu, pada tahun 2025 melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 33 Subkegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 6.204.072.681 dengan realisasi anggaran sampai kondisi pada akhir triwulan II sebesar Rp. 2.388.496.566 atau 38,50 %. Pagu anggaran tersebut merupakan pagu hasil efisiensi sebesar Rp. 552.074.996 sebagaimana kebijakan yang diberlakukan dari pemerintah pusat. Pagu APBD penetapan sebesar Rp. 6.756.147.677. Hal ini masih dibawah rata-rata capaian triwulanan, yang disebabkan terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi keuangannya karena rencana penyelesaian kegiatan direncanakan pada triwulan III dan IV.

Tabel II.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tri Wulan II

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor	Tindak Lanjut
1	Nilai realisasi penanaman modal	trilyun rupiah	2,2	1,1	[Pendorong] Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA) yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal. Upaya lain yang dilakukan antara lain penyusunan dokumen kebijakan bidang penanaman modal, peningkatan promosi serta penyediaan data perizinan dan nonperizinan	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.

2	Jumlah PMA PMDN	investor	10995	3863	[Pendorong] Meningkatkan realisasi investasi dipengaruhi oleh jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Sragen. Dengan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Peningkatan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, serta kemudahan layanan antara layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA), SIPIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Sragen) dan Si-Pelangi (Sistem Informasi Peluang Investasi) pendampingan penyusunan LKPM.	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepedulian investasi diharapkan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.
---	-----------------	----------	-------	------	---	--

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						132,63	38,50				
Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)						88,89					
Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)						89,20					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.204.072.681		2.388.496.566		38,50		
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			6.204.072.681		2.388.496.566		38,50		
2.18.01	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]	100	5.587.585.681	50	2.187.718.476	50	39,15		
2.18.01.2,01	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]	3	3.280.000	2	0	66,67	0	[TW2 - Pendorong] Kegiatan fisik telah sebagian dilaksanakan	[TW3] Penyusunan akan dilaksanakan sesuai jadwal rencana
2.18.01.2,0.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Dokumen]	3	1.600.000	2	0	66,67	0	[TW2 - Pendorong] Laporan Awal telah disusun	[TW3] Penyelesaian dokumen disesuaikan rencana
2.18.01.2,01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	1	1.680.000	1	0	100	0	[TW2 - Pendorong] kegiatan monitoring dilaksanakan pada TW berikutnya	[TW3] Penyelesaian dilaksnakan seuai rencana
2.18.01.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	12	3.895.270.179	8	1.740.462.420	66,67	44,68	[TW2 - Pendorong] pelaksanaan sesuai anggaran kas	[TW3] pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana

2.18.01.2,02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	25	3.895.270.179	28	1.740.462.420	112	44,68	[TW2 - Pendorong] pencairan sesuai anggaran kas	[TW3] pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana
2.18.01.2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]	2	26.183.000	0	0	0	0	[TW2 - Penghambat] adanya pergeseran anggaran akibat kebijakan efisiensi	[TW3] rencana kegiatan pada TW3
2.18.01.2,05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan [Orang]	4	8.438.000	0	0	0	0	[TW2 - Penghambat] kegiatan dilakukan pergeseran	[TW3] pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas
2.18.01.2,05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	30	17.745.000	0	0	0	0	[TW2 - Penghambat] rencana pelaksanaan kegiatan pada TW3	[TW3] kegiatan disesuaikan dengan rencana
2.18.01.2,06	Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12	348.826.600	6	45.082.000	50	12,92	[TW2 - Pendorong] Sebagian kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana	[TW3] peningkatan realisasi keuangan pada TW3
2.18.01.2,06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4	27.826.000	2	8.565.000	50	30,78	[TW2 - Pendorong] Kegiatan fisik telah dilaksanakan	[TW3] peningkatan pencairan keuangan pada TW3
2.18.01.2,06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	8	155.256.600	4	17.639.000	50	11,36	[TW2 - Penghambat] Kegiatan fisik sebagian telah dilaksanakan	[TW3] Peningkatan realisasi keuangan
2.18.01.2,06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4	48.204.000	2	15.278.000	50	31,69	[TW2 - Pendorong] kegiatan sesuai rencana	[TW3] peningkatan kegiatan pada TW3
2.18.01.2,06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	4	45.540.000	2	0	50	0	[TW2 - Pendorong] realisasi kegiatan fisik telah dilaksanakan	[TW3] peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3
2.18.01.2,06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	1	7.000.000	1	3.600.000	100	51,43	[TW2 - Pendorong] kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	[TW3] peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3

2.18.01.2,06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	25	55.000.000	10	0	40	0	[TW2 - Penghambat] Sebagian kegiatan telah dilaksanakan	[TW3] peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3
2.18.01.2,06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1	10.000.000	1	0	100	0	[TW2 - Pendorong] Kegiatan fisik telah dilaksanakan	[TW3] pengajuan pencairan anggaran
2.18.01.2,07	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	2	96.947.000	0	0	0	0	[TW2 - Pendorong] Pelaksanaan pengadaan menyesuaikan pergeseran anggaran	[TW3] pelaksanaan kegiatan pada TW3
2.18.01.2,07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	1	35.000.000	0	0	0	0	[TW2 - Penghambat] Pelaksanaan kegiatan menunggu ketersediaan barang di E-Catalog	[TW3] Kegiatan dilanjutkan pada TW3
2.18.01.2,07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [Unit]	4	26.742.000	0	0	0	0	[TW2 - Penghambat] Menunggu ketersediaan barang di E-Catalog	[TW3] Dilaksanakan pada TW3
2.18.01.2,07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	28	35.205.000	0	0	0	0	[TW2 - Penghambat] rencana kegiatan dilakukan pergeseran	[TW3] kegiatan dilanjutnya pada TW3
2.18.01.2,08	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12	942.117.912	6	332.207.314	50	35,26	[TW2 - Pendorong] Sebagian kegiatan secara fisik telah dilaksanakan sesuai jadwal	[TW3] peningkatan realisasi kegiatan dan keuangan pada TW3
2.18.01.2,08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4	2.400.000	2	0	50	0	[TW2 - Penghambat] Kegiatan fisik telah dilaksanakan	[TW3] peningkatan realisasi keuangan pada TW3
2.18.01.2,08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	4	505.328.532	2	181.178.814	50	35,85	[TW2 - Pendorong] Kegiatan sesuai rencana	[TW3] peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana

2.18.01.2,08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	49.539.000	2	0	50	0	[TW2 - Penghambat] kegiatan fisik telah dilaksanakan	[TW3] peningkatan realisasi keuangan pada TW3
2.18.01.2,08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12	384.850.380	6	151.028.500	50	39,24	[TW2 - Pendorong] Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	[TW3] peningkatan realisasi kegiatan dan keuangan sesuai rencana
2.18.01.2,09	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	2	274.960.990	2	69.966.742	100	25,45	[TW2 - Pendorong] Sebagian besar kegiatan fisik telah dilaksanakan	[TW3] peningkatan realisasi kegiatan dan keuangan pada TW3
2.18.01.2,09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	15	170.035.990	16	60.016.742	106,67	35,30	[TW2 - Pendorong] Pelaksanaan pemeliharaan sesuai rencana	[TW3] peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan berdasarkan prioritas
2.18.01.2,09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	96	11.552.000	20	0	20,83	0	[TW2 - Penghambat] mebel masih cukup baik	[TW3] pemeliharaan sesuai prioritas
2.18.01.2,09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	1	15.760.000	1	0	100	0	[TW2 - Pendorong] aset masih cukup layak fungsi	[TW3] pemeliharaan sesuai prioritas
2.18.01.2,09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	1	49.765.000	1	9.950.000	100	19,99	[TW2 - Pendorong] pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	[TW3] peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan
2.18.01.2,09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	28	27.848.000	14	0	50	0	[TW2 - Pendorong] kondisi gedung masih cukup baik	[TW3] perbaikan sesuai prioritas
Rata-rata capaian kinerja (%)						100	39,15	50	39,15		
Predikat kinerja						ST	SR	SR	SR		
2.18.02	Meningkatnya dokumen kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]	50	77.368.000	30	52.119.000	60	67,37	[TW2 - Pendorong] Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan rencana	[TW3] Penyelesaian kegiatan pada TW3

2.18.02.2,01	Tersusunnya dokumen kebijakan penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal [dokumen]	1	77.368.000	1	52.119.000	100	67,37	[TW2 - Pendorong] Peningkatan penyelesaian kegiatan pada TW3	[TW3] Peningkatan penyelesaian kegiatan dan realisasi keuangan
2.18.02.2,01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal [Dokumen]	1	77.368.000	1	52.119.000	100	67,37	[TW2 - Penghambat] Dokumen Raperda di DPRD	[TW3] Pengesahan dan kesepakatan dengan DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)						100	67,37	60	67,37		
Predikat kinerja						ST	S	R	S		
2.18.03	Meningkatnya realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]	25	113.919.000	14,80	7.342.750	59,20	6,45	[TW2 - Pendorong] Meningkatnya penyebaran informasi	[TW3] pelaksanaan even promosi pada TW3
2.18.03.2,01	Terlaksananya even promosi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	2	113.919.000	1	7.342.750	50	6,45	[TW2 - Pendorong] Rencana kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan	[TW3] Kegiatan dilanjutkan pada TW3
2.18.03.2,01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2	113.919.000	1	7.342.750	50	6,45	[TW2 - Penghambat] Rencana Kegiatan sesuai jaadwal dan ditetapkan	[TW3] Kegiatan dilaksnakan pada TW3
Rata-rata capaian kinerja (%)						98,67	6,45	59,20	6,45		
Predikat kinerja						ST	SR	R	SR		
2.18.04	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [Poin]	84	346.347.000	87,75	102.143.340	104,46	29,49	[TW2 - Penghambat] adanya sistem baru yang belum dipahami masyarakat (SIPIPO beralih ke SIPIONER)	[TW3] sosialisasi secara elektronik melalui medsos secara rutin
2.18.04.2,01	Tersedianya standar pelayanan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100	346.347.000	100	102.143.340	100	29,49	[TW2 - Pendorong] Peningjauan SP menjadi salah prioritas	[TW3] pelaksanaan FKP

2.18.04.2,01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota [Dokumen]	150	54.951.000	67	10.772.840	44,67	19,60	[TW2 - Pendorong] Minat pelaku usaha sangat tinggi untuk mengikuti pelatihan	[TW3] meningkatkan kualitas pelatihan bagi umkm
2.18.04.2,01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [Pelaku Usaha]	3.200	100.863.500	968	36.633.000	30,25	36,32	[TW2 - Pendorong] Peningkatan Layanan Mobile (layanan bergerak)	[TW3] Peningkatan layanan
2.18.04.2,01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [Pelaku Usaha]	80	36.290.000	0	11.417.500	0	31,46	[TW2 - Penghambat] konsultasi yang tidak tercatat	[TW3] peningkatan dokumentasi dalam kegiatan
2.18.04.2,01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha [Kegiatan Usaha]	500	154.242.500	170	43.320.000	34	28,09	[TW2 - Penghambat] obyek pemantauan bidang perizinan berusaha yang kurang memadai	[TW3] Peningkatan sosialisasi bidang perizinan berusaha
Rata-rata capaian kinerja (%)						104,46	29,49	104,46	29,49		
Predikat kinerja						STS	SR	STS	SR		
2.18.05	Meningkatnya realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]	10	23.853.000	26	13.553.000	260	56,82	[TW2 - Pendorong] Peningkatan layanan melalui daring dan kelas online	[TW3] Peningkatan layanan melalui daring dan luring

2.18.05.2,01	Tercapainya cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100	23.853.000	100	13.553.000	100	56,82	[TW2 - Pendorong] terlaksananya pengendalian pelaksanaan yang tepat sasaran	[TW3] peningkatan pengendalian pelaksanaan
2.18.05.2,01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha [Kegiatan Usaha]	150	23.853.000	74	13.553.000	49,33	56,82	[TW2 - Pendorong] Peningkatan pengawasan melalui daring	[TW3] Peningkatan capaian kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)						260	56,82	260	56,82		
Predikat kinerja						STS	R	STS	R		
2.18.06	Meningkatnya laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]	50	55.000.000	50	25.620.000	100	46,58	[TW2 - Pendorong] pelaksanaan sesuai rencana	[TW3] melaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan
2.18.06.2,01	Penyusunan dokumen data informasi perizinan/ nonperizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	50	55.000.000	50	25.620.000	100	46,58	[TW2 - Pendorong] pelaksanaan sesuai rencana	[TW3] peningkatan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan
2.18.06.2,01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	1	55.000.000	1	25.620.000	100	46,58	[TW2 - Pendorong] pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	[TW3] peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja (%)						100	46,58				
Predikat kinerja						ST	SR				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen tahun 2025 dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran renja, visi dan misi Kabupaten Sragen yang tertuang dalam RKPD. Program kerja utama DPMPTSP Kabupaten Sragen sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Sragen adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab DPMPTSP dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Dalam Perubahan Renja Tahun 2025 terdapat 6 program, 12 kegiatan, dan 30 subkegiatan baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian program/kegiatan, maka pada setiap dirumuskan indikator kinerja. Seluruh program/ kegiatan/ subkegiatan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan sumber dana lainnya yang sah.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Sragen sesuai dengan usulan program/ kegiatan/ subkegiatan Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai berikut :

Tabel III.1
 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025
 DPMPTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					7.018.918.719	6.756.147.677	6.099.227.936	-919.690.783							7.330.100.000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.018.918.719	6.756.147.677	6.099.227.936	-919.690.783							7.330.100.000	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7.018.918.719	6.756.147.677	6.099.227.936	-919.690.783							7.330.100.000	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah		100 %	100 %	5.629.406.219	5.949.254.177	5.410.108.936	210.693.781							5.840.100.000	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun		3 dokumen	3 dokumen	5.763.000	5.763.000	3.943.000	-1.820.000			-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		6.600.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	2.917.000	2.917.000	2.263.000	-654.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			3.200.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	2.846.000	2.846.000	1.680.000	-1.166.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			3.400.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah		12 bulan	12 bulan	3.575.422.221	3.895.270.179	3.740.425.434	165.003.213			-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		3.600.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/ bulan	28 Orang/ bulan	3.575.422.221	3.895.270.179	3.740.425.434	165.003.213	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			3.600.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		2 laporan	2 laporan	64.528.000	64.528.000	16.580.000	-47.948.000			-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		64.500.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang	4 Orang	19.528.000	19.528.000	0	-19.528.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			16.500.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		30 Orang	30 Orang	45.000.000	45.000.000	16.580.000	-28.420.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			48.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah		12 bulan	12 bulan	520.899.600	520.899.600	367.538.200	-153.361.400			-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		673.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	39.936.000	39.936.000	32.326.000	-7.610.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			42.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0002	Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8 Paket	8 Paket	194.608.600	194.608.600	161.018.200	-33.590.400	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			280.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	70.415.000	70.415.000	48.204.000	-22.211.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			74.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	89.290.000	89.290.000	45.540.000	-43.750.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			110.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			12.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 Laporan	25 Laporan	100.000.000	100.000.000	63.450.000	-36.550.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			125.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	19.650.000	19.650.000	10.000.000	-9.650.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			30.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah		2 laporan	2 laporan	96.947.000	96.947.000	154.249.000	57.302.000			-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		200.000.000	DPMPTSP

	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		60.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4 Unit	22 Unit	26.742.000	26.742.000	74.945.000	48.203.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		50.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	0	0	0	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		20.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		28 Unit	14 Unit	35.205.000	35.205.000	44.304.000	9.099.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		70.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12 bulan	12 bulan	1.008.121.398	1.008.121.398	839.795.302	-168.326.096			-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-	976.000.000	DPMPTSP

	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	4 Laporan	6.000.000	6.000.000	2.400.000	-3.600.000	Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			6.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	4 Laporan	507.925.022	507.925.022	443.662.922	-64.262.100	Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			450.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	4 Laporan	77.161.000	77.161.000	50.854.000	-26.307.000	Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			90.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	417.035.376	417.035.376	342.878.380	-74.156.996	Kab. Sragen, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			430.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah		2 laporan	2 laporan	357.725.000	357.725.000	287.578.000	-70.147.000			-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		320.000.000	DPMPTSP

	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	15 Unit	230.520.000	230.520.000	169.130.000	-61.390.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		175.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																
			Jumlah Mebel yang Dipelihara		96 Unit	43 Unit	13.582.000	13.582.000	11.552.000	-2.030.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		15.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	1 Unit	18.260.000	18.260.000	9.282.000	-8.978.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		20.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	49.765.000	49.765.000	71.289.543	21.524.543	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		60.000.000	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		28 Unit	43 Unit	45.598.000	45.598.000	26.324.457	-19.273.543	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		50.000.000	DPMPTSP

2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun		50 %	50 %	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0							100.000.000	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal		1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0			-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		100.000.000	DPMPTSP
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengnenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaaman Modal																
			Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			100.000.000	DPMPTSP
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar		25 %	25 %	137.534.000	137.534.000	113.919.000	12.466.000							150.000.000	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi		2 kali	2 kali	137.534.000	137.534.000	113.919.000	-23.615.000			-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		150.000.000	DPMPTSP
	2.18.03.2.01.0002	Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		2 Dokumen	2 Dokumen	137.534.000	137.534.000	113.919.000	-23.615.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHAR GAAN KINERJA TAHUN SEBELUM NYA	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			150.000.000	DPMPTSP

4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan		84 Poin	84 Poin	482.359.500	482.359.500	346.347.000	27.640.500							510.000.000	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan</i>		100 %	100 %	482.359.500	482.359.500	346.347.000	-136.012.500			-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		510.000.000	DPMTSP
	2.18.04.2.01.0005	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>																
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		150 Dokumen	5 Dokumen	90.000.000	90.000.000	54.951.000	-35.049.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		100.000.000	DPMTSP
	2.18.04.2.01.0006	<i>PenyePelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>																
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>		3200 Pelaku Usaha	1350 Pelaku Usaha	119.992.000	119.992.000	100.863.500	-19.128.500	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		130.000.000	DPMTSP
	2.18.04.2.01.0007	<i>Penyediaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>																
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>		80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	45.000.000	45.000.000	36.290.000	-8.710.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		50.000.000	DPMTSP
	2.18.04.2.01.0008	<i>pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko</i>																

			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	227.367.500	227.367.500	154.242.500	-73.125.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			230.000.000	DPMPTSP
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM		10 %	10 %	614.619.000	32.000.000	23.853.000	15.381.000							630.000.000	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal		100 %	100 %	614.619.000	32.000.000	23.853.000	-590.766.000			-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	-		630.000.000	DPMPTSP
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha																
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		315 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	432.619.000	0	0	-432.619.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			450.000.000	DPMPTSP
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		150 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	182.000.000	32.000.000	23.853.000	-158.147.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas			180.000.000	DPMPTSP

6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik		50 %	50 %	55.000.000	55.000.000	105.000.000	45.000.000							100.000.000	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan</i>		50 %	50 %	55.000.000	55.000.000	105.000.000	50.000.000			-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		100.000.000	DPMPTSP
	2.18.06.2.01.0002	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>																
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>		1 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000	55.000.000	105.000.000	50.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas	Perwujudan layanan Investasi yang berkualitas		100.000.000	DPMPTSP

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja ini disusun berisikan program/ kegiatan/ subkegiatan sebagai pedoman rencana kinerja untuk tahun 2025, sebagai tindak lanjut atas Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Perlu menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan petunjuk teknis.
2. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja, mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Perubahan Renja ini disusun dengan menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi renja. Besar harapan kami agar dokumen renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan ke depan.

Demikian Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sragen, Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
NIP. 19791225 199810 1 001